

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (t.thn.). Diambil kembali dari
jambi.bps.go.id: <https://jambi.bps.go.id/>

Cahyadin, M., Sutomo, & Ratwianingsih, L. (2017). INDUSTRI
PERDAGANGAN DI INDONESIA: PERKEMBANGAN DAN
KINERJA. 78-88.

Darmayanti, E. F., & Rahayu, S. R. (2017). SOSIALISASI PAJAK
KEPADA PARA PEDAGANG UNTUK MENINGKATKAN
KESADARAN,. Vol . 1 No.1.

Effendy, T. S., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan
Nilai. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, VOL.1, NO.1.

Lintang, K., Kalangi, L., & Pusung, R. (2017). ANALISIS PENERAPAN E-
FAKTUR PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK UNTUK
PELAPORAN SPT MASA PPN PADA KPP PRATAMA MANADO.
Jurnal EMBA, 2023-2032.

Maulinda, A., & Lasmana, M. S. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer
pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. *Jurnal
Ekonomi Bisnis*, 44-53.

- Munthe, D. T. (2020). PEMANFAATAN E-COMMERCE DALAM PENERIMAAN PAJAK. *Jurnal Perpajakan*, 182-190.
- Oelietina. (2021). PENGARUH PANDEMI COVID 19 TERHADAP PEREKONOMIAN PROPINSI JAMBI. *e-Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 54- 66.
- Pemerintah Indonesia . (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Perpajakan .
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Pemerintah Indonesia. (2010). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 58/PJ/2010 tentang Bentuk dan Ukuran Formulir serta Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik .

Pemerintah Indonesia. (2015). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi, Tata, dan Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai .

Pemerintah Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 16/PJ/2021 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak.

Pertumbuhan penjualan eceran, 2018-2021. (t.thn.). Diambil dari <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pertumbuhan- penjualan- eceran-2018-2021-1615370828>

Rusli, D. (2013). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PEDAGANG ECERAN SEKTOR FORMAL PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT. *Tesis*.

Siahaan, F. O. (2005). The Influence Of Tax Fairness, Ethical Attitudes And Commitment On Taxpayer Compliance Behavior. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 33-44.

Sipitri, E. K. (2018). PENGARUH SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR, DAN JASA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA JAMBI. *Skripsi*.

- Sumarni, Y. (2020). PANDEMI COVID-19: TANTANGAN EKONOMI DAN BISNIS. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.
- Toly, T. S. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, VOL.1, NO.1.
- Weitz, B., & Levy, M. (2007). *Retailing Management*. New York: McGraw-Hill.
- Wiyarni, Hartini, & Djuhari, D. (2018). PENGARUH KOMPLEKSITAS PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS LAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 14-23.
- Yusuf, M. I. (2011). ANALISIS DETERMINAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI SUMATERA UTARA. *Tesis*.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Pusataka Obor Indonesia.